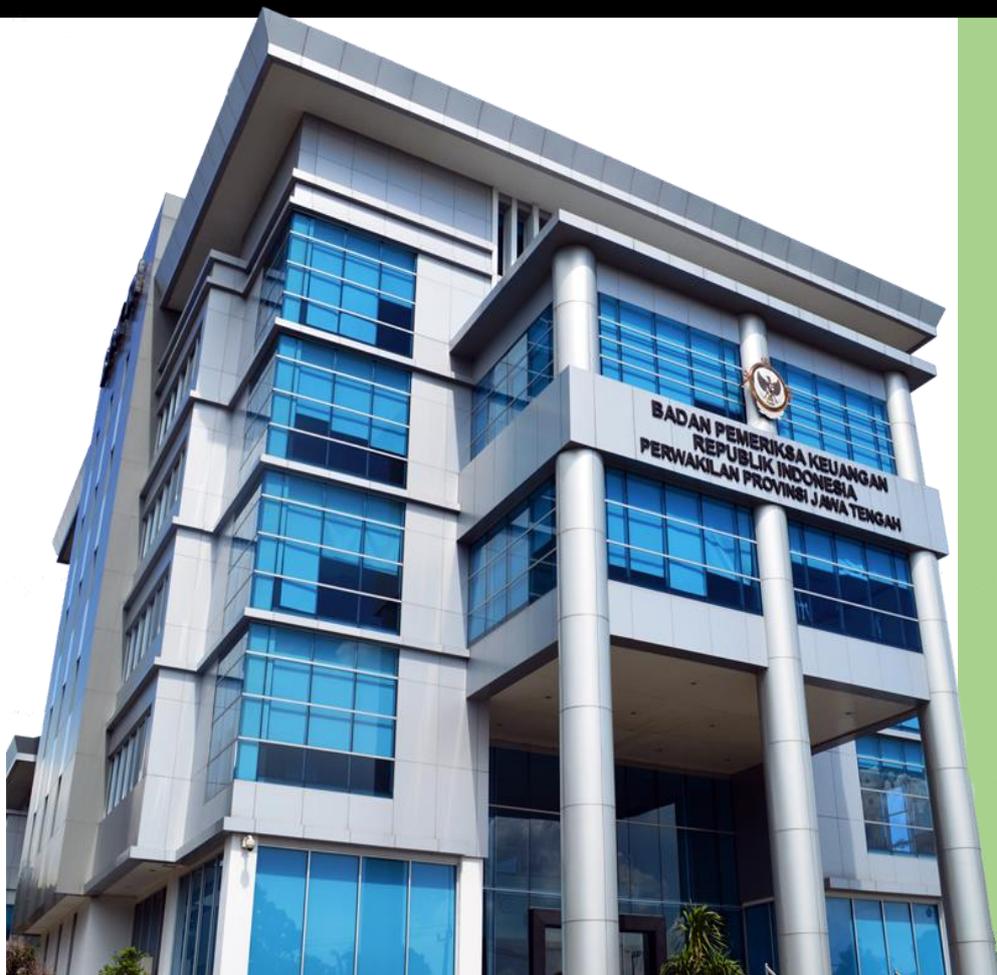




# LAPORAN KINERJA

BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH  
TRIWULAN I TAHUN 2024



**PRISMA**

APLIKASI PERENCANAAN  
STRATEGIS DAN  
MANAJEMEN KINERJA



**INDEPENDENSI . INTEGRITAS . PROFESIONALISME**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Hal Cover .....1

**BAB I Pendahuluan** ..... 2

A. Latar Belakang..... 2

B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah ..... 2

C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah ..... 3

D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah ..... 4

E. Isu Strategi ..... 5

**BAB II Perencanaan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah** ..... 7

A. Perencanaan Strategis ..... 7

B. Target Kinerja ..... 7

1. Perjanjian Kinerja ..... 8

2. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah ..... 10

**BAB III Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah** ..... 14

A. Hasil Evaluasi AKIP ..... 14

B. Capaian Kinerja Organisasi ..... 14

C. Analisis Efisiensi ..... 28

D. Perubahan Budaya Kerja ..... 29

E. Realisasi Anggaran ..... 29

F. Inovasi ..... 30

G. Penghargaan ..... 31

**BAB IV Penutup** ..... 32

Lampiran

- Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan aplikasi PRISMA
- Berita Acara Validasi TW IV

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas ridho-Nya kami telah menyelesaikan penyusunan "**Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Triwulan I Tahun 2024**".

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah merupakan laporan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Perwakilan Jawa Tengah selama Triwulan I Tahun 2024, dalam mendukung visi, misi, dan sasaran strategis BPK. Laporan ini menyajikan pencapaian dan evaluasi atas pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan target kerjanya dalam lingkup Perwakilan Jawa Tengah sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

BPK berupaya mendalami kebijakan dan masalah publik dengan memerhatikan isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat atau pemangku kepentingan. Untuk mencapai hal tersebut, BPK perlu meningkatkan kualitas pemeriksaan sesuai mandat, memenuhi permintaan pemangku kepentingan, dan pemeriksaan yang memerhatikan isu publik secara strategis, antisipatif, dan responsif. Strategi pemeriksaan BPK bersifat strategis karena akan memerhatikan unsur tematik, holistik, integratif, dan spasial sebagaimana menjadi karakter agenda pembangunan nasional yang diusung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Dengan memerhatikan unsur tersebut, BPK akan dapat melakukan pemeriksaan secara komprehensif mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pada seluruh kementerian/lembaga terkait dengan mengoptimalkan seluruh satker yang dimiliki BPK sesuai dengan kewenangan dan portofolionya masing-masing. Hal ini akan menghasilkan rekomendasi pemeriksaan dan bahan pendapat yang lebih berkualitas, serta berdampak signifikan sebagai bahan perbaikan pemerintah di masa yang akan datang.

Harus diakui bahwa tingkat pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah periode Triwulan I Tahun 2024 masih belum maksimal. Untuk itu diperlukan kerja lebih keras lagi di periode yang akan datang untuk dapat mencapai kinerja maksimal.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam laporan ini. Namun demikian, Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan kinerja BPK di masa yang akan datang.

Semarang, 30 April 2024

Kepala Perwakilan,

  
Hari Wiwono  
NIP. 196810011996031003

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan terpercaya, sesuai dengan semangat reformasi untuk mewujudkan sebuah system pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagaimana tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998, mensyaratkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di dalamnya.

Guna mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tersebut diperbarui dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, Perpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LAKIN) BPK disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja dikaitkan dengan anggaran serta pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Implementasi Renstra (RIR) BPK Tahun 2020-2024. Output dari proses pengukuran kinerja BPK adalah LAKIN Eselon II, LAKIN Eselon I dan LAKIN BPK.

### **B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Sesuai Pasal 543 ayat (1) dan (2) Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Tortama Keuangan Negara V dan dipimpin oleh seorang kepala. AKN V mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Departemen Dalam Negeri, Kementrian Agama, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintahan daerah di wilayah Sumatera dan Jawa. Dalam pelaksanaan tugasnya, AKN V didukung antara lain oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah di Semarang selaku unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi AKN V, khususnya tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

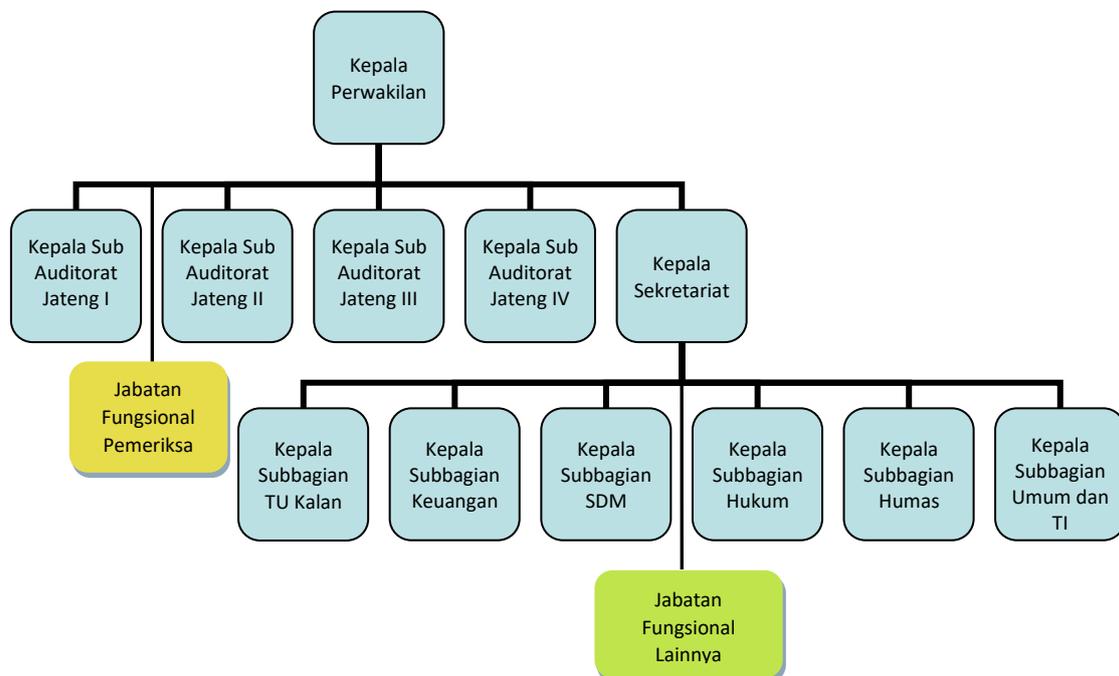
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi AKN V antara lain dengan merumuskan rencana aksi, kegiatan, dan kebijakan pemeriksaan di Provinsi Jawa Tengah, menyusun program, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, menetapkan tim pemeriksa, memperoleh keyakinan mutu hasil pemeriksaan, mengkompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah, mengevaluasi kegiatan pemeriksaan, mengkompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan

Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, serta mengelola sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi sarana dan prasarana, dan administrasi umum di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Perwakilan dan juga mengoperasikan Aplikasi Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja (PRISMA) untuk memantau kinerja Perwakilan dan memberikan kontribusi serta dukungan pada akuntabilitas kinerja BPK.

### C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, struktur organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 - Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Tugas dan lingkup kerja masing-masing Eselon III disajikan dalam tabel berikut:

| <b>Sub Auditorat</b>  |  |
|---|--|
| <p><b>Tugas:</b> Melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi</p>  |  |
| <p style="text-align: center;"><b>Sub Auditorat Jateng I</b></p> <p><b>Lingkup Pemeriksaan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah</li> <li>2. Kabupaten Semarang</li> <li>3. Kota Salatiga</li> <li>4. Kota Semarang</li> <li>5. Kabupaten Demak</li> <li>6. Kabupaten Jepara</li> <li>7. Kabupaten Kudus</li> <li>8. Kabupaten Pati</li> <li>9. Kabupaten Rembang</li> </ol>  | <p style="text-align: center;"><b>Sub Auditorat Jateng II</b></p> <p><b>Lingkup Pemeriksaan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kabupaten Boyolali</li> <li>2. Kabupaten Klaten</li> <li>3. Kabupaten Sukoharjo</li> <li>4. Kabupaten Wonogiri</li> <li>5. Kota Surakarta</li> <li>6. Kabupaten Blora</li> <li>7. Kabupaten Grobogan</li> <li>8. Kabupaten Karanganyar</li> <li>9. Kabupaten Sragen</li> </ol> |
| <p style="text-align: center;"><b>Sub Auditorat Jateng III</b></p> <p><b>Lingkup Pemeriksaan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kabupaten Banjarnegara</li> <li>2. Kabupaten Cilacap</li> <li>3. Kabupaten Kebumen</li> <li>4. Kabupaten Purbalingga</li> <li>5. Kabupaten Magelang</li> <li>6. Kabupaten Purworejo</li> <li>7. Kabupaten Temanggung</li> <li>8. Kabupaten Wonosobo</li> <li>9. Kota Magelang</li> </ol>                                       | <p style="text-align: center;"><b>Sub Auditorat Jateng IV</b></p> <p><b>Lingkup Pemeriksaan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kabupaten Boyolali</li> <li>2. Kabupaten Klaten</li> <li>3. Kabupaten Sukoharjo</li> <li>4. Kabupaten Wonogiri</li> <li>5. Kota Surakarta</li> <li>6. Kabupaten Blora</li> <li>7. Kabupaten Grobogan</li> <li>8. Kabupaten Karanganyar</li> <li>9. Kabupaten Sragen</li> </ol> |
| <p><b>Sekretariat Perwakilan</b></p> <p><b>Tugas :</b> menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah</p> <p><b>Susunan organisasi :</b> Subbagian Tata Usaha Kepala Perwakilan, Subbagian Keuangan, Subbagian SDM, Subbagian Hubungan Masyarakat, Subbagian Hukum, Subbagian Umum dan Teknologi Informasi</p> |  |

Gambar 1.2- Penjabaran tugas dan lingkup Eselon III

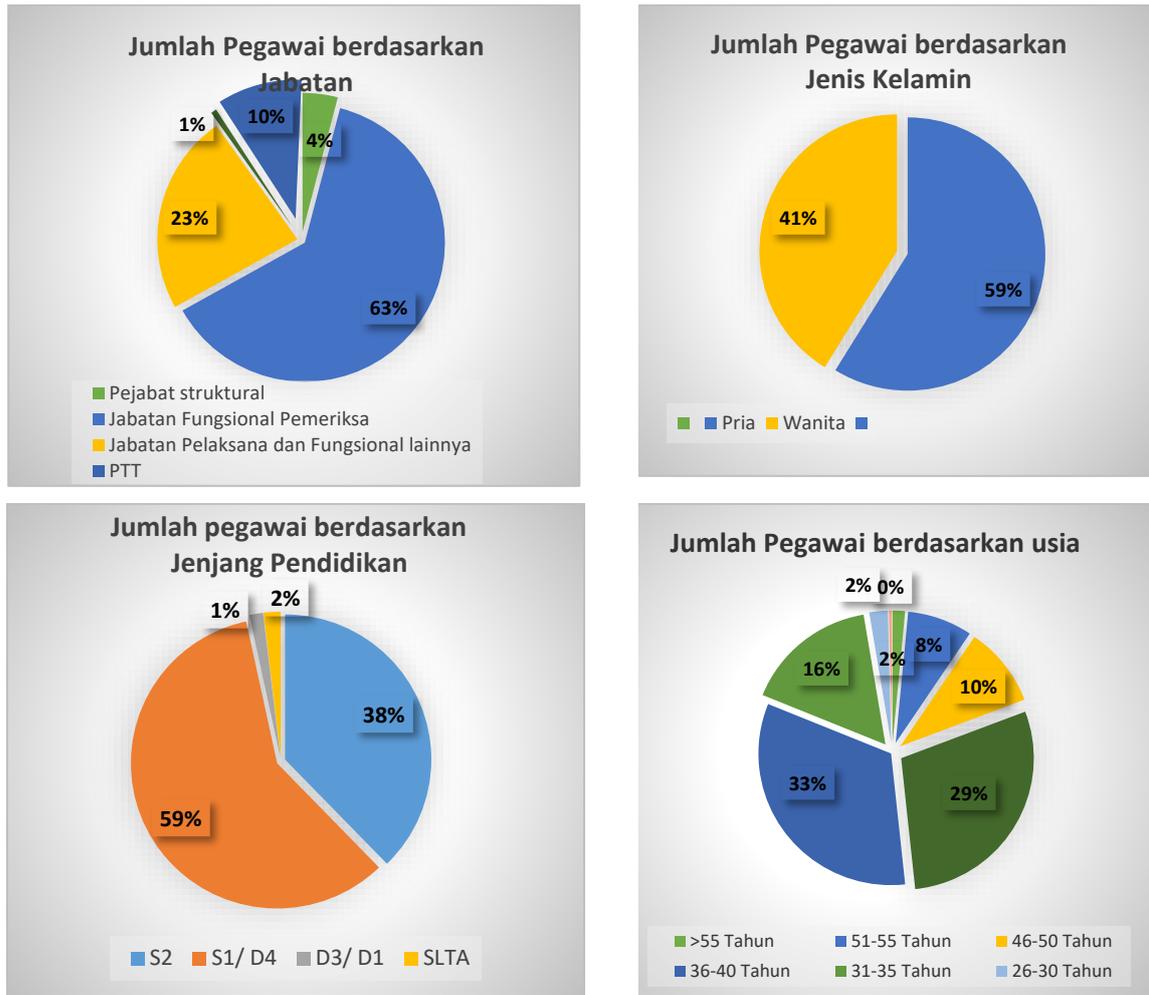
**D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah**

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah per 31 Maret 2024 berjumlah 296 pegawai, dengan rincian sebagai berikut :

- a. 265 Pegawai Tetap, terdiri dari 12 Pejabat Struktural, 185 Pejabat Fungsional Pemeriksa dan 68 staf dengan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Lainnya;
- b. 2 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- c. 29 Pegawai Tidak Tetap.

Secara ringkas komposisi pegawai disajikan dalam gambar 1.3 berikut:



Gambar 1.3- Komposisi Sumber Daya Manusia BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

2. Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah memiliki alokasi anggaran sebesar Rp51.865.983.000 dengan target 645 output.

E. Isu Strategis

Isu-isu strategis yang menjadi perhatian BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar  
Isu strategis tersebut diwujudkan dalam pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:
  - a. Pemeriksaan Kinerja Pembangunan Pansimas pada dua entitas pemeriksaan
  - b. Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Pariwisata pada dua entitas pemeriksaan
  - c. Pemeriksaan atas Belanja Modal Infrastruktur pada dua entitas
2. Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik  
Sesuai GUID 5270-*Guideline for the Audit of Corruption Prevention*, program antikorupsi utamanya berfokus pada 3 elemen utama yakni pencegahan (*prevention*), deteksi (*detection*), dan reaksi (*reaction*). Adapun peran BPK dalam upaya pemberantasan korupsi ini dapat dibagi menjadi empat kegiatan yaitu:

| Dilaksanakan oleh AKN / Perwakilan | Dilaksanakan oleh Auditorat Utama Investigasi (AUI) |
|------------------------------------|---|
| a. Pencegahan<br>b. Pendeteksian   | c. Investigasi<br>d. Dukungan Litigasi              |

Untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi tersebut di atas, BPK perlu menyusun Inisiatif Strategis (IS) “Peningkatan Peran BPK dalam Pemberantasan Korupsi Melalui Pengembangan Strategi Pencegahan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara”. Proses perumusan IS ini didasarkan pada Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Rencana Strategis (Renstra) BPK 2020-2024 serta Arah Kebijakan BPK yaitu arah kebijakan pertama “peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan”, pada Strategi 2 yaitu “meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif”. Pengampu IS ini adalah AUI namun dalam pelaksanaan IS ini diperlukan sinergi dan kerja sama dengan seluruh unit kerja lain di BPK baik di Kantor Pusat maupun Kantor Perwakilan.

Salah satu aktivitas IS 2.2 adalah penguatan Sistem Pencegahan Korupsi di Entitas yang terdiri dari kegiatan Reviu Sistem Pencegahan Korupsi di entitas melalui Pemeriksaan Non Investigatif, Pemeriksaan Kinerja Strategi Nasional dan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK dan AN PK), Pemberian pendapat atas Kebijakan Nasional Pemberantasan Korupsi, dan Fraud Awareness Training bagi entitas. Kegiatan reviu sistem dan pemeriksaan kinerja Stranas PK dan AN PK dilaksanakan melalui pemeriksaan tematik BPK tahun 2022 yang dikelompokkan pada pemeriksaan tematik Prioritas Nasional (PN) 7 khususnya Program Prioritas (PP) 3 Penegakan Hukum Nasional. Pemeriksaan tematik yang dilaksanakan adalah ***pemeriksaan efektivitas sistem pencegahan korupsi dan Stranas PK***.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

### A. Perencanaan Strategis

BPK mempunyai peran strategis dalam mendukung pencapaian tujuan negara melalui pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah dengan menyesuaikan periode Renstra BPK 2020-2024 dengan perencanaan RPJMN 2020-2024 di mana pada periode Renstra sebelumnya memiliki tenggat waktu satu tahun dengan periode RPJMN. Kebijakan penyesuaian periode ini bertujuan untuk menyelaraskan strategi pemeriksaan BPK dan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan periode program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Penyusunan Renstra BPK 2020-2024 di samping menyelaraskan periode dengan agenda pemerintah juga dituntut untuk selalu tanggap dan responsif atas isu-isu aktual. Karena itu, Renstra BPK 2020-2024 selain menyesuaikan dengan periode RPJMN juga telah merespons dampak bencana pandemi Covid-19. Hal ini merupakan langkah BPK agar hasil pemeriksaan BPK nantinya dapat bermanfaat untuk pengambilan keputusan oleh lembaga perwakilan, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mencapai tujuan negara.

Pelaksanaan pengelolaan pengukuran kinerja dilakukan sepanjang tahun yang meliputi proses penginputan, reviu internal dan validasi data capaian kinerja. Data realisasi capaian atas target IKU diinput oleh inputer masing-masing satker secara periodik, yang telah direviu oleh masing-masing manajer dan pimpinan satker. Adapun validasi data capaian kinerja dilaksanakan oleh Direktorat PSMK atas aspek keandalan data yang meliputi ketepatan waktu, kelengkapan dan akurasi data. Pengukuran kinerja dilakukan setiap triwulan dengan membandingkan capaian masing-masing indikator yang telah divalidasi dengan target triwulan yang terdapat dalam Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja. Sejak Tahun 2018, pelaksanaan pengukuran kinerja menggunakan Aplikasi PRISMA yang dikembangkan Direktorat PSMK bekerja sama dengan Biro Teknologi Informasi.

### B. Target Kinerja

#### 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sebagai bentuk upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.



Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, Direktorat PSMK dan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah menyusun Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2024. Indikator kinerja dan target kinerja ini dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah selaku Eselon II dan Pejabat Eselon I, dhi. Auditor Utama Keuangan Negara V.

Untuk lebih jelasnya, berikut Peta Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tahun 2024:



Gambar 2.2 Peta Strategis Tahun 2024

Untuk mengukur keberhasilan Renstra BPK Tahun 2020-2024, BPK menggunakan suatu Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK) yang merupakan sistem manajemen kinerja yang bekerja secara online serta berfungsi untuk memonitor, mengevaluasi, dan mengukur pencapaian kinerja dikaitkan dengan pencapaian tujuan strategis dalam Renstra dan Rencana Implementasi Renstra 2020-2024. Dalam pelaksanaannya, sejak Tahun 2018, aplikasi yang digunakan untuk implementasi SIMAK adalah Aplikasi Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja (PRISMA).

Siklus Pengukuran Kinerja Pelaksanaan pengelolaan pengukuran kinerja dilakukan sepanjang tahun yang meliputi proses penginputan, reuiu internal, dan validasi data capaian kinerja. Data realisasi capaian atas target IKU diinput oleh inputer masing-masing satker secara periodik. Data yang diinput tersebut adalah data yang telah direviu oleh masing-masing manajer dan pimpinan satker.

Adapun validasi data capaian kinerja dilaksanakan oleh Direktorat PSMK atas aspek keandalan data yang meliputi ketepatan waktu, kelengkapan dan akurasi data. Pengukuran kinerja dilakukan setiap triwulan dengan memperbandingkan capaian masing-masing indikator yang telah divalidasi dengan target triwulan yang terdapat dalam Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja.

**Tabel 2.1**  
**INDIKATOR DAN TARGET TAHUN 2024**

| Sasaran Kegiatan , Sasaran dan Anggaran  |                     | Keluaran | Indikator Kinerja Keluaran   | Target Tahun 2023       |
|--|---------------------|----------|--|-------------------------|
| <b>Sasaran Kegiatan:</b><br>Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan<br><br><b>Sasaran:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya Pemeriksaan berkualitas</li> <li>Meningkatnya layanan pemeriksaan</li> </ul> | Rp44.647.405.000,00 | IKU 1    | Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan              | 100%                    |
|  |                     | IKU 2    | Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan           | 100%                    |
|  |                     | IKU 3    | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan            | 75%                     |
|  |                     | IKU 4    | Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional | 100%                    |
|  |                     | IKU 5    | Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari para Pemangku Kepentingan                   | 100%                    |
|  |                     | IKU 6    | Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal    | 100%                    |
|  |                     | IKU 7    | Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK  | Sangat Memuaskan (4,81) |
|  |                     | IKU 8    | Hasil Evaluasi AKIP  | A (90,05)               |
|  |                     | IKU 9    | Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi                                    | 98%                     |
|  |                     | IKU 10   | Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan  | 100%                    |
|  |                     | IKU 11   | Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi            | Memuaskan (3,80)        |
|  |                     | IKU 12   | Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi                                   | 100%                    |
|  |                     | IKU 13   | Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran  | 84,50%                  |

2. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja 2024

Rencana Aksi menyajikan aktivitas utama per triwulan dalam rangka pencapaian target kinerja sesuai dokumen rencana aksi unit kerja. Pada bagian ini dijelaskan secara umum atas pelaksanaan kegiatan untuk mendukung pencapaian setiap indikator kinerja yang diampu oleh unit kerja. Rencana Aksi secara detail sebagai berikut:

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA  
TAHUN 2024**

Unit/Satuan Kerja : BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah  
Tahun : 2024

| Strategi/Sasaran/<br>Indikator Kinerja Utama<br>(IKU) | Target<br>Tahun<br>2024  | Rencana Pencapaian Kinerja |       |        |       | Rencana<br>Waktu<br>Penyelesaian | Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP<br>(Bulanan) |   |
|---|--|----------------------------|-------|--------|-------|----------------------------------|--|---|
|   |  | TW I                       | TW II | TW III | TW IV |                                  |  |   |
| (1)   | (2)  | (3)                        | (4)   | (5)    | (6)   | (7)                              | (8)  | (9)   |
| Strategi 2  | Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif |                            |       |        |       |                                  |  |   |
| Sasaran   | Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi                                   |                            |       |        |       |                                  |  |   |
| IKU 1   | Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan              | 100%                       | -     | 40%    | 40%   | 100%                             | Desember                                     | Januari dan Februari : <ul style="list-style-type: none"> <li>Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan Semester I sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP yg terdiri dari Ketua Tim, Pengendali Tim dan Penanggung Jawab) dan <i>Quality Assurance</i> (QA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP yang terdiri dari Kepala Subauditordat dan Kepala Perwakilan selaku Pemberi Tugas)</li> </ul> Maret s.d. Mei : <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan QC dari PT dan PJ melalui lapming dan diskusi mingguan pada pemeriksaan Semester I</li> </ul> Juni : <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemenuhan QA dan QC dalam pelaksanaan pemeriksaan Terinci LKPD atas 36 entitas</li> </ul> Juli dan Agustus : <ul style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan pemeriksaan disusun secara akurat dan lebih awal</li> <li>Penyusunan tim disusun lebih awal dan matang</li> </ul> September s.d Desember : |

| Strategi/Sasaran/<br>Indikator Kinerja Utama<br>(IKU) | Target<br>Tahun<br>2024  | Rencana Pencapaian Kinerja |       |        |       | Rencana<br>Waktu<br>Penyelesaian | Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP<br>(Bulanan) |  |
|---|--|----------------------------|-------|--------|-------|----------------------------------|--|--|
|   |  | TW I                       | TW II | TW III | TW IV |                                  |  |  |
| (1)   | (2)  | (3)                        | (4)   | (5)    | (6)   | (7)                              | (8)  | (9)  |
|   |  |                            |       |        |       |                                  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan kegiatan pemeriksaan Semester II sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP yg terdiri dari Ketua Tim, Pengendali Tim dan Penanggung Jawab) dan <i>Quality Assurance</i> (QA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP yang terdiri dari Kepala Subauditordat dan Kepala Perwakilan selaku Pemberi Tugas)</li> <li>Meningkatkan QC dari PT dan PJ melalui lapming dan diskusi mingguan pada pemeriksaan Semester II</li> <li>Pemenuhan QA dan QC pada pelaksanaan pemeriksaan Semester II</li> </ul> |
| IKU 2   | Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan | 100%                       | -     | -      | -     | 100%                             | Desember                                     | Januari dan Februari : <ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat koordinasi Penyusunan Rencana Pemeriksaan Tahun 2024</li> </ul> Maret : <ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat koordinasi Penyusunan Rencana Pemeriksaan Semester II Tahun 2024</li> </ul> April s.d Juni : -<br>Juli dan Agustus : <ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat koordinasi Penyusunan Rencana Pemeriksaan Semester II Tahun 2024</li> </ul> September dan Oktober : -<br>November dan Desember : <ul style="list-style-type: none"> <li>Meriview kesesuaian Simpulan dalam Konsep LHP Kinerja dan DTT dengan Harapan Penugasan</li> </ul>   |
| IKU 3   | Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan               | 75%                        | 75%   | 75%    | 75%   | 75%                              | Desember                                     | Januari s.d. Mei : <ul style="list-style-type: none"> <li>Mendorong entitas agar segera menyelesaikan rekomendasi BPK</li> <li>Melakukan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut melalui aplikasi SMP dan SIPTL</li> <li>Kegiatan verifikasi dan validasi dokumen tindak lanjut melalui SIPTL</li> <li>Verifikasi dan validasi tindak lanjut atas penyelesaian tindak lanjut yang terhambat penyelesaian statusnya ked alam status Telah Selesai (TS)</li> </ul> Juni : <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengumpulan bahan dalam rangka Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) untuk Semester I</li> </ul>  |

| Strategi/Sasaran/<br>Indikator Kinerja Utama<br>(IKU) |  | Target<br>Tahun<br>2024 | Rencana Pencapaian Kinerja |              |               |              | Rencana<br>Waktu<br>Penyelesaian | Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP<br>(Bulanan)   |
|---|--|-------------------------|----------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------|--|
| (1)   | (2)  | (3)                     | TW I<br>(4)                | TW II<br>(5) | TW III<br>(6) | TW IV<br>(7) | (8)                              | (9)  |
|   |  |                         |                            |              |               |              |                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan kegiatan pemeriksaan Semester II sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (FPF) yg terdiri dari Ketua Tim, Pengendali Tim dan Penganggung Jawab) dan <i>Quality Assurance</i> (QA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP) yang terdiri dari Kepala Subauditorat dan Kepala Perwakilan selaku Pemberi Tugas)</li> <li>Meningkatkan QC dari PT dan PJ melalui lapring dan diskusi mingguan pada pemeriksaan Semester II</li> <li>Pemenuhan QA dan QC pada pelaksanaan pemeriksaan Semester II</li> </ul> |
| IKU 2   | Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan | 100%                    | -                          | -            | -             | 100%         | Desember                         | Januari dan Februari :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat koordinasi Penyusunan Rencana Pemeriksaan Tahun 2024</li> </ul> Maret :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat koordinasi Penyusunan Rencana Pemeriksaan Semester II Tahun 2024</li> </ul> April s.d Juni : -<br>Juli dan Agustus :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat koordinasi Penyusunan Rencana Pemeriksaan Semester II Tahun 2024</li> </ul> September dan Oktober : -<br>November dan Desember :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Mergerview kesesuaian Simpulan dalam Konsep LHP Kinerja dan DIT dengan Harapan Penugasan</li> </ul>   |
| IKU 3   | Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan               | 75%                     | 75%                        | 75%          | 75%           | 75%          | Desember                         | Januari s.d Mei :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Mendorong entitas agar segera menyelesaikan rekomendasi BPK</li> <li>Melakukan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut melalui aplikasi SMP dan SIPTL</li> <li>Kegiatan verifikasi dan validasi dokumen tindak lanjut melalui SIPTL</li> <li>Verifikasi dan validasi tindak lanjut atas penyelesaian tindak lanjut yang terhambat penyelesaian statusnya ked alam status Telah Selesai (TS)</li> </ul> Juni :<br>Pengumpulan bahan dalam rangka Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) untuk Semester I   |

| Strategi/Sasaran/<br>Indikator Kinerja Utama<br>(IKU) |   | Target<br>Tahun<br>2024 | Rencana Pencapaian Kinerja |              |               |                         | Rencana<br>Waktu<br>Penyelesaian | Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP<br>(Bulanan)  |
|---|---|-------------------------|----------------------------|--------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|---|
| (1)   | (2)   | (3)                     | TW I<br>(4)                | TW II<br>(5) | TW III<br>(6) | TW IV<br>(7)            | (8)                              | (9)   |
|   |   |                         |                            |              |               |                         |                                  | Oktober s.d Desember :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Menunggu permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan</li> <li>Melaksanakan pemeriksaan yang diperintahkan oleh Badan jika terdapat permintaan dari pemangku kepentingan .....</li> </ul>  |
| IKU 6   | Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal | 100%                    | -                          | -            | 50%           | 50%                     | Desember                         | Januari s.d Juni : -<br>Juli s.d September:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan alokasi anggaran untuk pemeriksaan tematik nasional</li> <li>Koordinasi terkait tema pemeriksaan tematik nasional dalam rangka persiapan pemeriksaan</li> <li>Menyusun tim pemeriksaan tematik nasional</li> <li>Pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan tematik nasional</li> </ul> Oktober s.d Desember :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan pemeriksaan terinci tematik nasional</li> </ul>  |
| IKU 7   | Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK   | Sangat Memuaskan (4,81) | -                          | -            | -             | Sangat Memuaskan (4,81) | Desember                         | Januari s.d Maret :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring data pegawai pemeriksa yang memiliki hubungan kepentingan dengan entitas pemeriksaaan dan monitoring penugasan pemeriksaan pada setiap pemeriksa tidak lebih dari tiga kali berturut di entitas yang sama sebagai bahan pertimbangan penugasan pemeriksaan LKPD</li> <li>Sosialisasi atas Visi, Misi dan Nilai Dasar serta Kode Etik dalam Penerimaan Pimpinan maupun rapat - tatap yang dilaksanakan</li> <li>Pakta Integritas seluruh Tim Pemeriksa saat pemeriksaan terinci LKPD</li> <li>Pengarahan Kepala Perwakilan terkait IIP</li> </ul> April sd Juni : -<br>Juli s.d September :<br>Menginformasikan dan monitoring responden untuk mengisi kuesioner terkait implementasi nilai dasar BPK<br>Oktober s.d Desember : - |
| IKU 8   | Hasil Evaluasi AKIP   | AA (90,05)              | -                          | -            | -             | AA (90,05)              | Desember                         | Januari s.d Maret :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Rencana Aksi pencapaian kinerja tahun 2024</li> <li>Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku</li> </ul>  |

| Strategi/Sasaran/<br>Indikator Kinerja Utama<br>(IKU) |   | Target<br>Tahun<br>2024 | Rencana Pencapaian Kinerja |              |               |              | Rencana<br>Waktu<br>Penyelesaian | Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP<br>(Bulanan)  |
|---|---|-------------------------|----------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------|---|
| (1)   | (2)   | (3)                     | TW I<br>(4)                | TW II<br>(5) | TW III<br>(6) | TW IV<br>(7) | (8)                              | (9)   |
|   |   |                         |                            |              |               |              |                                  | April s.d Juni :<br>• Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan menacu pada aturan berlaku<br>• Evaluasi Pencapaian Kinerja Triwulan I dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja berdasar hasil evaluasi<br>Juli s.d September :<br>• Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan menacu pada aturan berlaku<br>• Evaluasi Pencapaian Kinerja Triwulan II dan Rencana Aksi pencapaian kinerja berdasar hasil evaluasi<br>Oktober s.d Desember :<br>• Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan menacu pada aturan berlaku<br>• Evaluasi Pencapaian Kinerja Triwulan III dan Rencana Aksi pencapaian kinerja berdasar hasil evaluasi<br>• Penyusunan LAKIN Tahun 2024 |
| IKU 9   | Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi | 98%                     | 28%                        | 65%          | 75%           | 98%          | Desember                         | Januari s.d, Desember :<br>• Pimpinan mendorong pelaksanaan tupoksi dengan memanfaatkan layanan TI yang telah disediakan kepada seluruh pegawai seperti memaksimalkan penggunaan email perwakil, memanfaatkan aplikasi persuratan (JASMDN), Update SISDM, SiAP LK, SiAP Banparpol, SMP<br>• Menggunakan email BPK untuk semua tugas kedinasan<br>• Melakukan monitoring setiap triwulan   |
| IKU 10  | Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan     | 100%                    | 25%                        | 37,5%        | 50%           | 100%         | Desember                         | Januari s.d Maret :<br>• Evaluasi Penerapan <i>Best Practice</i> Tahun 2023<br>• Inventarisir usulan <i>Best Practice</i> di Perwakil<br>• Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan :<br>1. Diklat persiapan Pemeriksaan IKPD TA 2023<br>2. Wawancara berbasis Pengetahuan : Tugas Pokok dan Fungsi Resepsionis di Kantor BPK Perwakil Jawa Tengah<br>April s.d Juni :<br>• Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan ( <i>Blogging</i> )<br>Juli s.d September :<br>• Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan ( <i>In House Training</i> )   |

| Strategi/Sasaran/<br>Indikator Kinerja Utama<br>(IKU) |   | Target<br>Tahun<br>2024 | Rencana Pencapaian Kinerja |       |       |              |       |       |               |       |       |              |       |       | Rencana<br>Waktu<br>Penyelesaian   | Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP<br>(Bulanan) |
|---|---|-------------------------|----------------------------|-------|-------|--------------|-------|-------|---------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--|--|
| (1)   | (2)   | (3)                     | TW I<br>(4)                |       |       | TW II<br>(5) |       |       | TW III<br>(6) |       |       | TW IV<br>(7) |       |       | (8)  | (9)  |
|   |   |                         |                            |       |       |              |       |       |               |       |       |              |       |       | Oktober s.d Desember :<br>• Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan ( <i>In House Training</i> )  |  |
| IKU 11  | Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi | Memuaskan (3,80)        | -                          | -     | -     | -            | -     | -     | -             | -     | -     | -            | -     | -     | Januari s.d Desember :<br>• Meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di lingkungan Perwakil salah satunya melalui kegiatan komunikasi audit  |  |
| IKU 12  | Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi                        | 100%                    | 5%                         | 10%   | 15%   | 20%          | 25%   | 40%   | 50%           | 60%   | 70%   | 80%          | 90%   | 100%  | Desember :<br>• Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan Balai Diklat<br>• Mengajukan proposal permohonan diklat kompetensi bagi pegawai<br>• Menginventarisasi kebutuhan angka kredit jam diklat dan tonik pengembangan kompetensi pegawai<br>Februari s.d Desember :<br>• Menginventarisasi kebutuhan angka kredit jam diklat dan tonik pengembangan kompetensi pegawai<br>• Pegawai mendaftar diklat secara mandiri, sesuai dengan jadwal diklat yang ditawarkan pada aplikasi Sisdiklat bpk.go.id<br>• Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi Pemeriksa (80 jam pelajaran selama 2 tahun atau 40 jam pelajaran selama 1 tahun) dan non pemeriksa (20 jam pelajaran selama 1 tahun) |  |
| IKU 13  | Tingkat Kinerja Anggaran  | 84,5%                   | 84,5%                      | 84,5% | 84,5% | 84,5%        | 84,5% | 84,5% | 84,5%         | 84,5% | 84,5% | 84,5%        | 84,5% | 84,5% | Desember :<br>• Melakukan rapat koordinasi evaluasi pengelolaan anggaran TA.2022 dan Kebijakan TA. 2022<br>• Menyusun Dokumen penganggaran dan Pemantauan atas pelaksanaan realisasi Anggaran<br>• Menyusun data capaian output<br>Februari s.d Juni :<br>• Monitoring dan menyusun data capaian output dan realisasi anggaran<br>Juli :<br>• Melakukan rapat evaluasi pengelolaan anggaran TA.2023 Semester I<br>• Menyusun Dokumen penganggaran dan Pemantauan atas pelaksanaan realisasi Anggaran   |  |

| Strategi/Sasaran/<br>Indikator Kinerja Utama<br>(IKU) |     | Target<br>Tahun<br>2024 | Rencana Pencapaian Kinerja |              |               |              | Rencana<br>Waktu<br>Penyelesaian | Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP<br>(Bulanan)  |
|---|-----|-------------------------|----------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------|---|
| (1)   | (2) | (3)                     | TW I<br>(4)                | TW II<br>(5) | TW III<br>(6) | TW IV<br>(7) | (8)                              | (9)   |
|   |     |                         |                            |              |               |              |                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun data capaian output.</li> </ul> Agustus s.d November : <ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan menyusun data capaian output dan realisasi anggaran</li> </ul> Desember : <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan rapat evaluasi pengelolaan anggaran TA.2023 Semester II</li> <li>Menyusun Dokumen penganggaran dan Pemantauan atas pelaksanaan realisasi Anggaran</li> <li>Menyusun data capaian output.</li> </ul> |

**Keterangan:**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Kolom (1)          | : Diisi dengan nomor urut IKU Unit Satuan Kerja  |
| Kolom (2)          | : Diisi dengan nomenklatur IKU Unit Satuan Kerja.  |
| Kolom (3)          | : Diisi dengan Target Tahun 2024   |
| Kolom (4) s.d. (7) | : Diisi dengan target maksimal setiap triwulan dengan memperhatikan proses bisnis Unit Satuan Kerja target tahunan dan karakteristik masing-masing indikator kinerja.  |
| Kolom (8)          | : Diisi dengan rencana waktu penyelesaian  |
| Kolom (9)          | : Diisi dengan rencana kegiatan/aktivitas yang mendukung pencapaian kinerja.<br>Rencana kegiatan merupakan langkah-langkah dari unit/satuan kerja yang disusun secara rinci dan lengkap pada triwulan I, II, III dan IV sehingga dapat menggambarkan upaya Unit/Satuan Kerja dalam mencapai target indikator kinerja (kolom 3). Unit/Satuan kerja diharapkan dapat menggambarkan upaya-upaya yang akan dilakukan melalui rencana kegiatannya tersebut agar pada akhir tahun pencapaian kinerja dapat tercapai.<br><br>Catatan: Khusus untuk IKU Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan, mohon mencantumkan jenis Aktivitas Manajemen Pengetahuan yang akan direncanakan setiap triwulan (minimal empat jenis aktivitas manajemen pengetahuan yang berbeda selama Tahun 2024). |

Gambar 2.3 Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2024

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Hasil Evaluasi AKIP

Evaluasi AKIP merupakan evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh Satuan Kerja di BPK. Evaluasi ini bertujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja di BPK.

Dari hasil revidu selama 3 tahun terakhir, diketahui terdapat peningkatan akuntabilitas kinerja diantaranya terkait BPK yang telah memiliki ukuran kinerja individu yang mengacu kepada indikator kinerja satuan kerja melalui Sasaran Kinerja Pegawai-Indikator Kinerja Individu (SKP-IKI), yang telah diterapkan juga oleh Perwakilan Jawa Tengah.

Perwakilan Jawa Tengah juga senantiasa berupaya melakukan evaluasi dan perbaikan, diantaranya :

1. Melakukan analisis permasalahan pada Hasil Evaluasi AKIP tahun sebelumnya;
2. Adanya dukungan dan komitmen dari Manajemen serta pengelola kinerja di Perwakilan Jawa Tengah; dan
3. Komunikasi intensif dengan Itama terkait hal-hal yang memerlukan perbaikan.

#### B. Capaian Kinerja Organisasi

Pengelolaan kinerja BPK dimulai dari penetapan target yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran atas capaian target yang telah ditetapkan tersebut dilakukan secara berkala melalui Aplikasi PRISMA meliputi proses penginputan, validasi, dan revidu data input.

Pengukuran capaian indikator ditetapkan berdasarkan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Pengukuran kinerja menganut prinsip *self assessment* dimana data realisasi kinerja diinput oleh masing-masing satker ke dalam Aplikasi PRISMA
2. Terdapat tiga jenis polarisasi indikator (ekspektasi nilai realisasi indikator terhadap nilai targetnya) yaitu:
  - a. *maximize* - nilai realisasi diharapkan lebih tinggi dari target;
  - b. *minimize* - nilai realisasi diharapkan lebih rendah dari target;
  - c. *stabilize* - nilai realisasi diharapkan berada dalam rentang tertentu
3. Capaian indikator ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, dengan *range* sebagai berikut:

| Color Range   | Deskripsi              |
|---|------------------------|
|  | Skor $\geq$ 100        |
|  | $80 \geq$ Skor $<$ 100 |
|  | Skor $<$ 80            |

4. Seluruh indikator telah dilengkapi dengan manual pengukuran yang memuat mengenai definisi, tujuan, formula, bobot, satuan pengukuran, dan polarisasi masing-masing indikator beserta sumber data bukti pendukung dan penanggung jawab atas indikator
5. Validitas data kinerja mempertimbangkan tiga aspek utama yaitu ketepatan waktu, kelengkapan data, dan keakuratan data.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja meliputi:

1. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan Pendahuluan dan Terinci atas seluruh LKPD di wilayah Provinsi Jawa Tengah TA 2023 ;
2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap kegiatan perkantoran;
3. Penerapan manajemen pengetahuan ;
4. Pemenuhan jam diklat sebagai pengembangan kompetensi; dan
5. Pemanfaatan Kinerja atas Implementasi Anggaran.

Skor capaian kinerja selama lima tahu terakhir menunjukkan tren sebagai berikut:



Gambar 3.1 Capaian Kinerja selama Lima Tahun terakhir

Capaian kinerja atas ketiga belas indikator secara rinci disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**CAPAIAN KINERJA PERWAKILAN JAWA TENGAH**  
**TAHUN 2023**

| Sasaran Kegiatan:<br>Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan                                      | Indikator Kinerja IKU |  | Target Tahun 2024 | Target TW I / 2024 | Realisasi TW I / 2024 | Skor kinerja |
|--|-----------------------|--|-------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
|  | IKU 1                 | Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan              | 100%              | -                  | -                     |              |
| Sasaran:<br>Meningkatnya Pemeriksaan berkualitas<br>Meningkatnya layanan pemeriksaan<br>Meningkatnya | IKU 2                 | Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan           | 100%              | -                  | -                     |              |
|  | IKU 3                 | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan            | 75%               | 75%                | 94,18%                |              |
|  | IKU 4                 | Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional | 100%              | -                  | -                     |              |
|  | IKU 5                 | Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari para Pemangku Kepentingan                   | 100%              | 100%               | 100%                  |              |

|                     |        | Target Tahun 2024   | Target TW I / 2024 | Realisasi TW I / 2024 | Skor kinerja |
|---------------------|--------|---|--------------------|-----------------------|--------------|
|                     | IKU 6  | Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal | 100%               | -                     | -            |
|                     | IKU 7  | Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK   | 4,81               | -                     |              |
|                     | IKU 8  | Hasil Evaluasi AKIP   | 90,05              | -                     |              |
|                     | IKU 9  | Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi                                 | 98%                | 28%                   | 56,79%       |
|                     | IKU 10 | Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan                                     | 100%               | 25%                   | 25%          |
|                     | IKU 11 | Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi         | 3,80               | -                     |              |
|                     | IKU 12 | Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi                                | 100%               | 15%                   | 76,34%       |
|                     | IKU 13 | Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran                                       | 84,50%             | 84,50%                | 87,24%       |
| <b>SKOR KINERJA</b> |        |   |                    | <b>43,69%</b>         |              |

Adapun perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan realisasi tiga tahun terakhir sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Realisasi Tahun Pelaporan dengan Realisasi Tiga Tahun Terakhir**

| Sasaran Program/Sasaran Kegiatan                  | Indikator Kinerja  | Target Tahun 2024 | Realisasi TW I / 2024 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2022 |
|---|--|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| (1)   | (2)  | (3)               | (4)                   | (5)                  | (6)                  |
| <b>Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan</b> | Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan              | 100%              | -                     | 95,67%               | 98,11%               |
|   | Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan           | 100%              | -                     | 100,00%              | 100%                 |
|   | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan            | 75%               | 94,18%                | 94,18%               | 92,47%               |
|   | Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional | 100%              | -                     | 101,25%              | 102,01%              |
|   | Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari para Pemangku Kepentingan                   | 100%              | 100%                  | 100,00%              | 100,13%              |

| Sasaran Program/Sasaran Kegiatan   | Indikator Kinerja   | Target Tahun 2024 | Realisasi TW I / 2024 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2022 |
|--|---|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| (1)  | (2)   | (3)               | (4)                   | (5)                  | (6)                  |
|  | Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal | 100%              | -                     | 103,47%              | 101,11%              |
| Meningkatnya Pemeriksaan berkualitas<br>Meningkatnya layanan pemeriksaan<br>Meningkatnya | Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK   | 4,81              |                       | 4,68                 | 4,84                 |
|  | Hasil Evaluasi AKIP   | 90,05             |                       | 91,40                | 90,14                |
|  | Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi                                 | 98%               | 56,79%                | 98,31%               | 96,21%               |
|  | Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan                                     | 100%              | 25%                   | 102,14%              | 101,43%              |
|  | Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi         | 3,80              | -                     | 4,17                 | 4,26                 |
|  | Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi                                | 100%              | 76,34%                | 100,00%              | 100,00%              |
|  | Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran                                       | 84,50%            | 87,24%                | 91,07%               | 90,62%               |

Selanjutnya, perbandingan realisasi tahun pelaporan dengan Target Lima Tahun sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Realisasi Tahun Pelaporan dengan Target Lima Tahun**

| No  | Indikator Kinerja   | Target Kinerja Lima Tahun |      |      |      |      | Realisasi TW I / 2024 | Capaian 2024 terhadap Target Akhir Renstra (Tahun 2024) |
|-----|---|---------------------------|------|------|------|------|-----------------------|---|
|     |   | 2020                      | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                       |   |
| (1) | (2)   | (3)                       | (4)  | (5)  | (6)  | (7)  | (8)                   | (9)   |
| 1.  | Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan dan Mutu Pemeriksaan | 100%                      | 100% | 100% | 100% | 100% | -                     | -   |
| 2.  | Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan  | 100%                      | 100% | 100% | 100% | 100% | -                     | -   |
| 3.  | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan   | 75%                       | 75%  | 75%  | 75%  | 75%  | 94,18%                | 125,57%   |

| No  | Indikator Kinerja  | Target Kinerja Lima Tahun |       |       |       |       | Realisasi TW I / 2024 | Capaian 2024 terhadap Target Akhir Renstra (Tahun 2024) |
|-----|--|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|---|
|     |  | 2020                      | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |                       |   |
| (1) | (2)  | (3)                       | (4)   | (5)   | (6)   | (7)   | (8)                   | (9)   |
| 4.  | Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional | 100%                      | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | -                     | -   |
| 5.  | Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari para Pemangku Kepentingan                   | 100%                      | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%                  | 100%  |
| 6.  | Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal    | 100%                      | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | -                     | -   |
| 7.  | Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK  | 5,00                      | 5,00  | 5,00  | 5,00  | 5,00  |                       | -   |
| 8.  | Hasil Evaluasi AKIP  | 86,00                     | 87,00 | 88,00 | 89,00 | 90,05 |                       | -   |
| 9.  | Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi                                    | 95%                       | 96%   | 97%   | 98%   | 100%  | 56,79%                | 57,95%  |
| 10  | Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan  | 100%                      | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 25%                   | 25%   |
| 11. | Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi            | 3,80                      | 3,80  | 3,80  | 3,80  | 3,80  | -                     | -   |
| 12. | Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi                                   | 100%                      | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 76,34%                | 76,34%  |
| 13. | Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran  | 87%                       | 87,5% | 88%   | 88,5% | 89,7% | 87,24%                | 103,24%   |

Penjelasan atas capaian masing-masing IKU dapat diuraikan sebagai berikut:

**IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan**

IKU ini bertujuan untuk ini mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada dua tingkatan yaitu:

1. hasil Quality Assurance (QA) dan Quality Control (QC)
2. hasil evaluasi EPP atas LHP atas tingkat akurasi dan konsistensi atas LHP yang diterbitkan

**Tabel 3.4 Capaian IKU 1**

| IKU 1<br>Pemenuhan Pengendalian dan<br>Pemerolehan Keyakinan Mutu<br>Pemeriksaan | Tahun  |        |        |        |                |
|--|--------|--------|--------|--------|----------------|
|  | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | TW I /<br>2024 |
| Target TW I  | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | -              |
| Realisasi *)   | 78,47% | 86,22% | 98,11% | 95,67% | -              |
| Capaian  | 78,47  | 86,22  | 98,11  | 95,67  | -              |
| Persentase Realisasi terhadap Target<br>Tahun 2024                               | -      | -      | 98,11% | 95,67% | -              |

\*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

IKU 1 - Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan akan terealisasi pada Triwulan II, karena pada Triwulan I kegiatan Pemeriksaan LKPD masih berjalan dan akan selesai pada Triwulan II. Sehingga pada hasil pengukuran Triwulan I, realisasi masih nol.

Namun demikian, Perwakilan Jawa Tengah senantiasa meningkatkan kualitas pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan, mulai dari komitmen untuk melengkapi dokumen lembar revidu sampai dengan memastikan keakuratan dan konsistensi penyajian pada LHP yang disusun.

Upaya lain yang dilakukan oleh Perwakilan Provinsi Jawa Tengah adalah mengoptimalkan pemanfaatan Aplikasi SiAP (Sistem Aplikasi Pemeriksaan). Aplikasi SiAP yang digunakan oleh pemeriksa dalam mendokumentasikan setiap tahapan pemeriksaan atau program kerja perorangan sampai dilakukan proses revidu secara berjenjang oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP). Pengoptimalan aplikasi ini bermanfaat dalam menghemat anggaran biaya perjalanan dinas dan mempermudah pemerolehan keyakinan mutu atas setiap tahapan pemeriksaan oleh PFP, terstandar serta diperolehnya keyakinan yang memadai bahwa setiap prosedur pemeriksaan telah dilaksanakan.

**IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan**

IKU ini menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian Simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan DTT yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2) Kinerja dan DTT.

**Tabel 3.5 Capaian IKU 2**

| IKU 2<br>Tingkat Kesesuaian Hasil<br>Pemeriksaan yang Memenuhi<br>Harapan Penugasan | Tahun |      |      |      |                |
|---|-------|------|------|------|----------------|
|   | 2020  | 2021 | 2022 | 2023 | TW I /<br>2024 |
| Target TW I   | 100%  | 100% | 100% | 100% | -              |
| Realisasi *)  | 100%  | 100% | 100% | 100% | -              |
| Capaian   | 100   | 100  | 100  | 100  | -              |
| Persentase Realisasi terhadap Target<br>Tahun 2024                                  | -     | -    | 100% | 100% | -              |

\*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

IKU 2- Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan baru akan terealisasi pada Triwulan IV, karena LHP Kinerja dan DTT diterbitkan pada Triwulan IV. Sehingga pada hasil pengukuran Triwulan I, realisasi masih nol.

Perwakilan Jawa Tengah senantiasa berkomitmen untuk senantiasa menjaga kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan. Hal ini membutuhkan dukungan dan komitmen seluruh unsur dari Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP) dan Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP) dalam memenuhi tujuan dan simpulan pemeriksaan, sebagaimana tercantum dalam Program Pemeriksaan serta Harapan Penugasan.

Peran unsur-unsur tersebut dibutuhkan untuk menjaga agar LHP BPK mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan untuk kepentingan publik yang dilaksanakan secara efektif, ekonomis dan efisien.

Selain itu, perwujudan komitmen ini dilaksanakan dengan mengadakan pelatihan berupa *in-house training, knowledge transfer forum*, atau rapat-rapat pengarahan antara manajemen dengan para pemeriksa sehingga dapat terwujud sinergi dalam menjaga komitmen.

### IKU 3 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

IKU ini menunjukkan tingkat kepatuhan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara.

Rekomendasi yang diukur adalah rekomendasi yang telah disampaikan kepada auditee sejak tahun 2005.

Tabel 3.6 Capaian IKU 3

| IKU 3 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan | Tahun  |        |         |        |             |
|---|--------|--------|---------|--------|-------------|
|   | 2020   | 2021   | 2022    | 2023   | TW I / 2024 |
| Target TW I   | 75%    | 75%    | 75%     | 75%    | 75%         |
| Realisasi *)  | 85,78% | 87,71% | 92,47%  | 94,18% | 94,18%      |
| Capaian   | 105    | 105    | 105     | 105    | 105         |
| Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024                           | -      | -      | 123,29% | 125,57 | 125,57%     |

\*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

Realisasi IKU 3 pada TW I tahun 2024 adalah sebesar 94,18% dari target sebesar 75%, sehingga skor capaiannya sebesar 105. Realisasi ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 92,47%. Hal ini mengindikasikan bahwa rekomendasi hasil pemeriksaan BPK telah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah setempat.

Secara rinci, penghitungan persentase atas IKU-3 sebagai berikut:

| Formula   |   |
|---|---|
| $((a + d) / e) \times 100\%$  |   |
| 3.1. Jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti (a)                      | 29.272  |
| 3.2. Jumlah rekomendasi yang belum selesai/masih dalam proses ditindaklanjuti (b)   | 1.779   |
| 3.3. Jumlah rekomendasi belum ditindaklanjuti (c)                                   | 35  |
| 3.4. Jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah (d) | 84  |
| 3.5. Jumlah rekomendasi yang telah disampaikan ke auditee(e)                        | 31.170  |
| <b>Realisasi IKU 3</b>  | <b>= <math>((a+d)/e) \times 100\%</math> = 94,18%</b> |

Ketercapaian target ini didukung oleh komitmen dan peran aktif BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah bersama dengan para *stakeholder* untuk meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan serta tingkat pemanfaatan teknologi informasi di. aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) dan Sistem Pemantauan Tindak Lanjut (SiPTL).

Untuk mempertahankan capaiannya, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah akan senantiasa berupaya untuk mengupayakan langkah-langkah strategis dan simultan dalam pelaksanaan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Selain itu, BPK Perwakilan Jawa Tengah melalui dosir-dosir entitas senantiasa mengingatkan kepada Inspektorat tiap daerah sebagai *counterpart* untuk selalu memperbarui data tindak lanjut melalui SIPTL.

#### **IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional**

*IKU ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's*

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Sumber data yang digunakan untuk pengukuran IKU ini adalah LHP Pemeriksaan Tematik dan RKP Pemeriksaan. Karena Pemeriksaan Tematik dilaksanakan mulai pada TW III maka IKU 6 akan terealisasi pada Triwulan IV.

Perkembangan capaian IKU 4 dalam empat tahun terakhir sebagai berikut:

**Tabel 3.7 Capaian IKU 4**

| IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional | Tahun   |         |         |         |             |
|--|---------|---------|---------|---------|-------------|
|  | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | TW I / 2024 |
| Target TW I  | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | -           |
| Realisasi *)   | 101,52% | 100,88% | 102,01% | 101,25% | -           |
| Capaian  | 101,52  | 100,88  | 102,01  | 101,25  | -           |
| Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024                                      | -       | -       | 102,01% | 101,25% | -           |

\*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

#### **IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari para Pemangku Kepentingan**

*IKU ini bertujuan untuk mengukur jumlah permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti BPK.*

Indikator ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan IPH. Pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsif BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan.

Sumber data yang digunakan sebagai pengukuran yaitu Surat Permintaan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan, Surat Tugas Pemeriksaan, LHP, dan Surat Keluar Penyampaian LHP.

**Tabel 3.8 Capaian IKU 5**

| IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari para Pemangku Kepentingan | Tahun |         |         |        |             |
|--|-------|---------|---------|--------|-------------|
|  | 2020  | 2021    | 2022    | 2023   | TW I / 2024 |
| Target TW I  | 100%  | 100%    | 100%    | 100%   | 100%        |
| Realisasi *)   | 100%  | 100,29% | 100,13% | 100%   | 100%        |
| Capaian  | 100   | 100,29  | 100,13  | 100,00 | 100,00      |
| Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024                    |       |         | 100,13% | 100%   | 100%        |

\*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

Upaya efisiensi yang dilakukan oleh BPK adalah mengelola permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan khususnya terkait permintaan Investigasi dalam satu Unit Kerja Eselon I yaitu Auditorat Utama Investigasi (AUI).

Standar penilaian IKU 5 adalah apabila **ada permintaan** perhitungan kerugian daerah/negara dari pemangku kepentingan.

### IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

IKU ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan atas tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMD dan SDG's dengan sumber data pengukuran LHP Pemeriksaan Tematik dan RKP Pemeriksaan.

Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK Perwakilan minimal **satu kali** dalam periode Renstra.

Karena Pemeriksaan Tematik dilaksanakan mulai pada triwulan III maka IKU 6 akan terealisasi pada Triwulan IV.

Perkembangan capaian IKU-6 selama empat tahun terakhir tersaji pada tabel berikut:

**Tabel 3.9 Capaian IKU 6**

| IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal Kepentingan | Tahun |         |         |         |             |
|---|-------|---------|---------|---------|-------------|
|   | 2020  | 2021    | 2022    | 2023    | TW I / 2024 |
| Target TW I   | 100%  | 100%    | 100%    | 100%    | -           |
| Realisasi *)  | 100%  | 100,99% | 101,11% | 103,47% | -           |
| Capaian   | 100   | 100,99  | 101,11  | 103,47  | -           |
| Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024   |       |         | 101,11% | 103,47% | -           |

\*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

### IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

IKU ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pegawai BPK dalam memahami visi misi dan nilai dasar BPK yang dilakukan melalui survei.

Indikator ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK. Sesuai rencana aksi, IKU ini akan terealisasi pada triwulan IV. Perkembangan capaian IKU dalam empat tahun terakhir tersaji pada tabel berikut:

**Tabel 3.10 Capaian IKU 7**

| IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK       | Tahun |       |        |        |             |
|---|-------|-------|--------|--------|-------------|
|   | 2020  | 2021  | 2022   | 2023   | TW I / 2024 |
| Target TW I                                     | 5,00  | 5,00  | 5,00   | 5,00   | -           |
| Realisasi *)                                    | 4,59  | 4,43  | 4,84   | 4,68   | -           |
| Capaian   | 91,80 | 88,60 | 96,80  | 93,60  | -           |
| Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024 |       |       | 96,80% | 93,60% | -           |

\*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

Perwakilan Jawa Tengah senantiasa berupaya agar nilai – nilai dasar BPK menjadi budaya kerja yang dapat diterapkan oleh para pegawai. Diantaranya dengan cara:

- 1) Mengadakan sosialisasi atas implementasi nilai dasar BPK
- 2) Meningkatkan pengawasan implementasi nilai dasar kepada seluruh pegawai dan pimpinan di BPK
- 3) Memberikan *reward* dan *punishment* secara adil terhadap pelaksanaan implementasi nilai dasar
- 4) Memberikan pendampingan implementasi nilai dasar dalam pelaksanaan pekerjaan
- 5) Meningkatkan implementasi nilai dasar secara konsisten dan berkesinambungan

Upaya efisiensi yang dilakukan oleh BPK dalam pengukuran indikator ini adalah perubahan metodologi survei yang semula berbasis manual menjadi *digital*. Dengan adanya perubahan ini terjadi efisiensi bagi internal BPK dan pihak *surveyor*. Perubahan ini bermanfaat bagi internal BPK antara lain penghematan anggaran, responden lebih banyak sehingga survei lebih representatif, dan hasil survei *realtime*. Sedangkan manfaat bagi pihak *surveyor* berupa efisiensi tenaga *surveyor*, pengolahan data survei lebih cepat, dan pemantauan pelaksanaan survei *realtime*.

### **IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP**

*Evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh Satuan Kerja di BPK*

IKU ini bertujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja di BPK. Sumber data pengukuran yang digunakan adalah hasil evaluasi AKIP dari Itama. Secara rinci, perkembangan capaian IKU-8 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.11 Capaian IKU 8**

| IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP                       | Tahun |       |         |         |             |
|---|-------|-------|---------|---------|-------------|
|   | 2020  | 2021  | 2022    | 2023    | TW I / 2024 |
| Target TW I                                     | 86,00 | 86,00 | 88,00   | 89,00   | -           |
| zRealisasi *)                                   | 92,24 | 86,01 | 90,14   | 91,40   | -           |
| Capaian   | 105   | 98,86 | 102,43  | 102,70  | -           |
| Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024 |       |       | 100,10% | 101,50% | -           |

\*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

Dalam pelaksanaan kegiatannya, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah memiliki aktivitas kegiatan yang beragam. Atas hal tersebut, Inspektorat Utama melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah agar output yang dihasilkan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Sesuai Rencana Aksi, IKU 8 akan terealisasi pada Triwulan IV.

### **IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi**

*IKU ini bertujuan untuk mendorong satker agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.*

IKU ini diukur berdasarkan pemanfaatan layanan aplikasi umum (SISDM, JASMIN) dan layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SiPTL, dan SiAP).

Untuk mendorong *IT culture* di lingkungan BPK, seluruh unit kerja diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK.

1. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SISDM (20%) diukur dari pembaruan data (*updating*) data masing-masing pegawai dalam satu unit kerja pada menu LHKPN, tempat tinggal, pendidikan dinas, SPT, dan informasi pegawai;
2. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi JASMIN (15%) diukur dengan memperhatikan log akses aplikasi JASMIN dan tindak lanjut atas surat masuk untuk Pejabat Struktural sampai level Pejabat Eselon IV dalam satu unit kerja;
3. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SMP (20%) diukur dengan memperhatikan log akses aplikasi SMP dalam satu unit kerja Pemeriksaan;
4. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiAP (20%) diukur dengan memperhatikan log akses aplikasi SiAP untuk setiap Tim Pemeriksa dalam satu unit kerja;
5. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SIPTL (25%) diukur dengan memperhatikan log akses aplikasi SIPTL dan tingkat validasi level satuan kerja atas data tindak lanjut yang diinput entitas.

Perkembangan IKU-9 selama empat tahun terakhir sebagai berikut:

**Tabel 3.12 Capaian IKU 9**

| IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi | Tahun  |        |        |         |             |
|---|--------|--------|--------|---------|-------------|
|   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023    | TW I / 2024 |
| Target TW I                                       | 95%    | 96%    | 97%    | 98%     | 28%         |
| Realisasi *)                                      | 99,18% | 99,18% | 96,21% | 98,31%  | 56,79%      |
| Capaian   | 104,39 | 103,31 | 99,19  | 100,32  | 105         |
| Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024   |        |        | 99,19% | 100,32% | 57,95%      |

\*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

Realisasi IKU-9 pada 2023 sebesar 56,79% diatas target yang ditetapkan (28%), sehingga skor capaiannya sebesar 105. Nilai ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Secara rinci dapat dijelaskan pada formulasi berikut:

| <u>Formula</u>  |   |                 |
|---|---|-----------------|
| $(20\% \times a) + (15\% \times b) + (20\% \times c) + (20\% \times d) + (25\% \times e)$ |   |                 |
| a. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SISDM   | =   | 90,45%          |
| b. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi JASMIN  | =   | 92,57%          |
| c. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SMP   | =   | 0,94%           |
| d. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiAP  | =   | 6,98%           |
| e. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiPTL   | =   | 92,92%          |
| <b>Realisasi IKU 9 =</b>  | <b><math>(20\% \times a) + (15\% \times b) + (20\% \times c) + (20\% \times d) + (25\% \times e)</math></b> | <b>= 56,79%</b> |

Hasil capaian ini menunjukkan bahwa para pegawai telah berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran pegawai tersebut perlu terus ditingkatkan, baik dalam hal kualitas layanan TI maupun sosialisasi kepada seluruh pegawai sebagai user. Dengan demikian, IKU ini dapat dipenuhi secara menyeluruh pada akhir periode Renstra BPK 2020–2024.

### IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

Manajemen Pengetahuan dipandang sebagai upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi.

IKU ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana satker mempraktikkan manajemen pengetahuan khususnya pada identifikasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan dan penerapan pengetahuan.

Pengukuran Manajemen Pengetahuan dilihat dari dua unsur, yaitu:

- a. **Innovative Practice** (tingkat penyusunan atau penerapan *Best Practise*) yaitu:
  - 1) Usulan *Best Practice* (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Satuan kerja dapat mengajukan kembali usulan *best practice* yang pernah diajukan pada tahun sebelumnya, dengan menarasikan aspek inovasi/kebaruan/*update*.
  - 2) Penerapan BP merupakan implementasi atas BP yang telah melewati proses validasi dan ditetapkan untuk diimplementasi oleh Unit Kerja selain pengusul BP. Satuan kerja yang mengimplementasi BP perlu menyusun laporan atas kegiatan implementasi tersebut dan menarasikan aspek inovasi/kebaruan/*update* atas BP yang diimplementasi.
- b. **Aktivitas Manajemen Pengetahuan** merupakan metode yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan *sharing*/penyebaran informasi/pengetahuan. Metode-metode tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, rewiu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, mentoring sebagaimana tercantum pada Peraturan Sekjen BPK RI No 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan BPK.

Selama triwulan I, aktivitas manajemen pengetahuan yang sudah dilaksanakan meliputi:

- 1) Diklat Pemeriksaan LKPD TA 2023
- 2) Wawancara berbasis Pengetahuan dengan tema Tugas Pokok dan Fungsi Resepsionis di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Wawancara Berbasis Pengetahuan "menciptakan suasana kerja yang kondusif"

Perkembangan IKU-10 secara rinci tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel 3.13 Capaian IKU 10**

| IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan  | Tahun |      |         |         |             |
|---|-------|------|---------|---------|-------------|
|   | 2020  | 2021 | 2022    | 2023    | TW I / 2024 |
| Target TW I                                     | 100%  | 100% | 100%    | 100%    | 25%         |
| Realisasi *)                                    | 150%  | 100% | 101,43% | 102,14% | 25%         |
| Capaian   | 105   | 100  | 101,43  | 102,14  | 100,00      |
| Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024 |       |      | 101,43% | 102,14% | 25%         |

\*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

Realisasi IKU-10 pada triwulan I sebesar 25% sesuai dengan target yang ditetapkan. Ketercapaian tersebut didukung oleh komitmen para pelaksana kegiatan dalam melaksanakan dan mendokumentasikan aktivitas manajemen pengetahuan.

Upaya efisiensi yang dilakukan oleh BPK antara lain pemanfaatan portal intranet BPK dan aplikasi JASMIN untuk mengunggah usulan BP. Manfaat yang diperoleh adalah penghematan anggaran perjalanan dinas dan belanja barang serta kemudahan akses bagi satker yang akan mereplikasi BP.

Peningkatan capaian akan semakin baik jika didorong dengan pelaksanaan kegiatan rutin dan strategis antara lain:

- 1) Peningkatan pemahaman atas *knowledge management* dan BP;
- 2) Sistem *rewarding* atas usulan BP dari satker yang terpilih menjadi BP level BPK Wide secara lebih memadai;
- 3) Sosialisasi berkelanjutan melalui berbagai kegiatan terkait *knowledge management* dan BP yang melibatkan satker di lingkungan BPK;
- 4) Penentuan prioritas kegiatan terkait pembangunan portal *knowledge management* terutama dalam hal kebutuhan penyempurnaan pembangunan portal sebagai sarana/media BP *sharing*.

Pengelola dan pihak-pihak terkait pelaksanaan IS BPS*sharing* diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan BP sesuai dengan Roadmap Implementasi Manajemen Pengetahuan BPK yang telah disusun, sehingga pelaksanaan BP di BPK dapat terimplementasi secara menyeluruh. Atas capaian yang baik ini diharapkan dapat dipertahankan hingga akhir tahun Renstra BPK 2020-2024.

### **IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi**

*IKU ini bertujuan untuk mendorong Perwakilan agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerja sama, dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan.*

Indikator ini menunjukkan tingkat kepuasan para pemangku kepentingan BPK atas kualitas hubungan, kerja sama, dan komunikasi yang dilakukan oleh seluruh satker terkait di BPK.

Capaian Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi diukur melalui **survei oleh lembaga independen** yang dilaksanakan secara tahunan, dengan sasaran responden eksternal yaitu mitra domestik (IAI, KAP, Perguruan Tinggi, dan media massa), *auditee*, lembaga perwakilan, Instansi Penegak Hukum (IPH) termasuk responden internal yaitu pegawai BPK yang memanfaatkan layanan perpustakaan BPK, baik di kantor pusat maupun di kantor BPK Perwakilan wilayah barat dan timur. Sesuai rencana aksi tahun 2024, IKU 11 akan terealisasi pada triwulan IV.

Pengukuran dilakukan menggunakan skala sebagai berikut:

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| 1,00 - 1,99 | sangat tidak memuaskan |
| 2,00 - 2,99 | tidak memuaskan        |
| 3,00 - 3,99 | memuaskan              |
| 4,00 - 5,00 | sangat memuaskan       |

**Tabel 3.14 Capaian IKU 11**

| IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi | Tahun  |      |         |         |             |
|--|--------|------|---------|---------|-------------|
|  | 2020   | 2021 | 2022    | 2023    | TW II/ 2024 |
| Target TW I  | 3,80   | 3,80 | 3,80    | 3,80    | -           |
| Realisasi *)   | 3,94   | 4,09 | 4,26    | 4,17    | -           |
| Capaian  | 103,68 | 105  | 105     | 105     | -           |
| Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024                            |        |      | 112,10% | 109,74% | -           |

\*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

### IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

IKU ini bertujuan bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tugas dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan pegawai BPK.

Sejak Tahun 2020, BPK telah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka mewujudkan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara, antara lain melalui pengalihan pelaksanaan diklat dari klasikal menjadi daring (*online*) melalui *e-learning* dan *Learning Management System (LMS)* sebagai penyesuaian selama kondisi pandemi COVID-19, memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas layanan kediklatan baik dari kualitas layanan sarana prasarana, fasilitator maupun media pembelajaran.

Selain itu juga dilakukan penguatan komitmen dalam menjalin kerja sama, komunikasi, dan koordinasi yang baik dalam pelaksanaan kegiatan diklat, sertifikasi dan akreditasi dengan para mitra kerja sama.

Manfaat pelaksanaan diklat secara daring (*online*) antara lain penghematan anggaran untuk perjalanan dinas, belanja barang, penggunaan SDM, dan efisiensi waktu.

Pemenuhan pengembangan kompetensi diatur sebagai berikut:

1. Standar jam pelatihan bagi pemeriksa paling tidak 80 jam pendidikan dalam 2 tahun (SPKN) dan bagi non pemeriksa paling tidak 20 jam pendidikan dalam 1 tahun (UU 5 2014)
2. Sehingga standar pengembangan kompetensi di BPK adalah 40 JP setahun untuk pemeriksa dan 20 JP setahun untuk non pemeriksa

*Cut-off* perhitungan jumlah pegawai adalah tanggal **30 September**. Dalam hal terjadi mutasi, jika pegawai mulai aktif di Satker baru sebelum tanggal 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di Satker baru. Jika sesudah tanggal 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di Satker lama.

**Tabel 3.15 Capaian IKU 12**

| IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi | Tahun  |      |      |      |             |
|---|--------|------|------|------|-------------|
|   | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | TW I / 2024 |
| Target TW I   | 100%   | 100% | 100% | 100% | 15%         |
| Realisasi *)  | 97,35% | 100% | 100% | 100% | 76,34%      |
| Capaian   | 97,35  | 100  | 100  | 105  | 105         |
| Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024     |        |      | 100% | 100% | 76,34%      |

\*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

Realisasi IKU-12 pada triwulan I sebesar 76,34% melebihi dari target target yang ditetapkan, yaitu 15%, sehingga skor capaiannya sebesar 105. Ketercapaian ini didukung oleh komitmen seluruh pegawai untuk selalu mengembangkan kompetensinya, dukungan para atasan langsung serta peran pro aktif Subbag SDM dalam melakukan monitoring pemenuhan jam diklat pegawai.

Untuk mempertahankan capaian ini, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah secara berkala akan melakukan monitoring pemenuhan jam diklat, mengadakan Diklat Pembekalan bagi para Pemeriksa yang akan melaksanakan Pemeriksaan LKPD serta mengikutsertakan diklat secara *daring* bagi Pemeriksa di sela-sela waktu diluar kegiatan pemeriksaan.

### IKU 13 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran

Tingkat Kinerja Anggaran mengukur capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Satuan Kerja yang memiliki dokumen anggaran (DIPA) mandiri yang dilihat dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA).

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas aspek **implementasi Kinerja Anggaran**. Tingkat kinerja atas aspek implementasi adalah evaluasi tingkat kinerja untuk menghasilkan informasi kinerja atas penggunaan anggaran dalam mencapai keluaran sesuai PMK Nomor 22 Tahun 2021, yang diukur dengan empat variabel, yaitu: (1) Penyerapan anggaran (2) Konsistensi antara penyerapan anggaran terhadap perencanaan (3) Pencapaian output (4) Efisiensi.

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) adalah rangkaian aktifitas terintegrasi dalam rangka mereview, memantau dan mengevaluasi **pelaksanaan anggaran belanja** pada Satuan Kerja yang memiliki DIPA mandiri berdasarkan PMK Nomor 195 Tahun 2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Tabel 3.16 Capaian IKU 13

| IKU 13 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran    | Tahun  |        |         |         |             |
|---|--------|--------|---------|---------|-------------|
|   | 2020   | 2021   | 2022    | 2023    | TW I / 2024 |
| Target TW I                                     | 87%    | 87,50% | 88%     | 88,50   | 84,5%       |
| Realisasi *)                                    | 92,26% | 91,21% | 90,62%  | 91,07   | 87,24%      |
| Capaian   | 105    | 104,24 | 102,98  | 102,90  | 103,24      |
| Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024 |        |        | 101,02% | 101,53% | 103,24%     |

\*) Data realisasi merupakan data yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK (Berita Acara Validasi)

Realisasi IKU-13 pada triwulan I adalah sebesar 87,24% dari target sebesar 84,50%, sehingga capaiannya sebesar 103,24. Ketercapaian ini didukung oleh komitmen dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak, terutama Subbag Keuangan dalam melakukan monitoring atas penyerapan anggaran.

Untuk mempertahankan capaian ini, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah akan senantiasa berupaya memonitor anggaran dengan mempertimbangkan aspek penyerapan anggaran, konsistensi kesesuaian penyerapan terhadap perencanaan, fokus pada output serta efisiensi.

### C. Analisis Efisiensi

Dalam rangka mewujudkan pencapaian Strategi 2- Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif serta memberikan pelayanan prima kepada stakeholder dilakukan upaya efisiensi yang dapat mendorong terlaksananya kegiatan dan pelayanan yang lebih baik. Upaya-upaya efisiensi yang dimaksud antara lain berupa pemanfaatan teknologi informasi, pengelolaan BMN, efisiensi anggaran, dan sumber daya manusia sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan teknologi informasi
  - a. Penggunaan aplikasi BPK di antaranya Jasmin, SiAP LK, dan SiPTL memberikan manfaat efisiensi di antaranya efisiensi anggaran untuk ATK, efisiensi waktu, dan kecepatan pelayanan;
  - b. Penggunaan aplikasi *zoom meeting* untuk melaksanakan komunikasi dengan *stakeholder* atau rapat-rapat internal dapat mengefisienkan anggaran makan dan minum.

2. Pengelolaan BMN,
  - a. Adanya inovasi berupa pemusnahan arsip kelas 4, memberikan manfaat berupa efisiensi penggunaan ruangan arsip;
  - b. Pemanfaatan fitur *file sharing* melalui jaringan internal BPK Perwakilan Jawa Tengah meminimalisir ruang penyimpanan arsip *hardcopy*.
3. Efisiensi Penggunaan Anggaran
  - a. Sisa anggaran pemeriksaan dialihkan untuk perjalanan dinas non pemeriksaan
  - b. Penghapusan anggaran honorarium
4. Efisiensi Sumber Daya Manusia

Dalam rangka efisiensi SDM, Perwakilan Jawa Tengah sesuai dengan kewenangannya menggunakan pemeriksa di luar BPK (KAP) yang bekerja untuk/dan atas nama BPK. Hal ini berdampak pada optimalnya alokasi pemeriksa untuk tiap entitas pemeriksaan.

#### D. Perubahan Budaya Kerja

Salah satu kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah untuk mengaplikasikan penerapan nilai-nilai dasar tersebut adalah **Jogo Konco** yaitu saling menjaga antar pegawai maupun antar unit kerja agar IIP terwujud serta saling menghargai dan mendukung profesi sesuai tupoksi masing-masing pegawai maupun antar unit kerja agar tercapainya sinergi, serta **Jateng Produktif** yaitu meningkatkan kerjasama antar pegawai maupun antar unit kerja guna mewujudkan kinerja yang tinggi dengan berpegang teguh pada IIP.

Penerapan IIP saat ini di lingkup Perwakilan Jawa Tengah telah dilaksanakan dengan baik, namun demikian penerapan IIP perlu terus dijaga dan ditingkatkan dengan adanya upaya saling dukung dari seluruh pegawai maupun unit kerja terkait. Dalam mewujudkan budaya kerja Jogo Konco dan Jateng Produktif, dibentuk tim pengembangan dan penerapan budaya kerja. Tim ini melakukan sosialisasi budaya kerja di lingkup BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Langkah-langkah yang dilakukan di antaranya:

1. Kristalisasi motto "**Jogo Konco untuk Jateng Produktif**" menjadi 3 perilaku yaitu Jogo Rogo, Jogo Roso dan Jogo Toto:
  - a. Jogo Rogo: bersama-sama antar elemen pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menjaga kondisi raga/badan yang sehat;
  - b. Jogo Roso: saling bekerja sama memberi suasana positif dan kenyamanan bekerja, sehingga secara psikologis pegawai merasa aman, tenang dan damai sehingga dapat meningkatkan motivasi kerja; dan
  - c. Jogo Toto: Mempedomani aturan sebagai penjabaran tata tertib sebagai dasar pelaksanaan perilaku seluruh pegawai, baik yang berhubungan dengan perilaku individu maupun perilaku yang berhubungan dengan kedinasan serta norma sosial yang berlaku di masyarakat.
2. Internalisasi Budaya kerja dan nilai-nilai BPK Jateng ke seluruh pegawai.

#### E. Realisasi Anggaran

Pada triwulan I, anggaran yang telah terealisasi untuk mewujudkan kinerja organisasi sebesar Rp17.397.106.705 (33,54%), dengan realisasi keluaran sebanyak 321 keluaran.

Secara rinci realisasi anggaran selama triwulan I tersaji dalam tabel 3.17 berikut:

**Tabel 3.17**  
**Perbandingan Realisasi Anggaran, Rincian Output, dan Indikator Kinerja**  
**Triwulan I Tahun 2024**

| No | Keluaran  | Anggaran          | Realisasi         |            |        | Indikator Kinerja                |
|----|---|-------------------|-------------------|------------|--------|----------------------------------|
|    |   |                   | Anggaran          | Prosentase | Output |                                  |
|    | Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian                  | Rp51.865.983.000  | Rp 17.397.106.705 | 33,54%     | 321    |                                  |
|    | Layanan Perkantoran   |                   |                   |            |        |                                  |
| 1  | Layanan Perkantoran   | Rp 29.074.130.000 | Rp 7.069.358.767  | 24,31%     | 1      |                                  |
| 2  | Layanan Sarana Internal   | Rp 322.285.000    | Rp 320.412.344    | 99,42%     | 59     |                                  |
|    | Pemeriksaan Keuangan  |                   |                   |            |        |                                  |
| 1  | LHP atas Banparpol pada BPK Perwakilan Jawa Tengah                                      | Rp 672.970.000    | Rp 449.592.075    | 66,81%     | 250    |                                  |
| 2  | Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan   | Rp 13.040.000     | -                 | -          | 0      |                                  |
| 3  | Sumbangan IHPS Perwakilan   | Rp 83.132.000     | Rp 56.467.237     | 67,92%     | 1      |                                  |
| 4  | Laporan Profil Entitas Perwakilan   | Rp 13.760.000     | -                 | -          | 0      |                                  |
| 5  | Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan                                      | Rp 284.184.000    | -                 | -          | 0      | IKU 3                            |
| 6  | Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah BPK Perwakilan Jawa Tengah | Rp 1.230.688.000  | -                 | -          | 0      | IKU 3                            |
| 7  | Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan   | Rp 456.475.000    | Rp 181.946.698    | 39,86%     | 3      | IKU 5                            |
| 8  | Layanan Manajemen Internal Perwakilan   | Rp 1.404.941.000  | Rp 180.933.498    | 12,88%     | 7      |                                  |
| 9  | LHP BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah FAF.U21   | Rp 18.310.378.000 | Rp 9.138.396.086  | 49,91%     | 0      | IKU 1<br>IKU 2<br>IKU 4<br>IKU 6 |

#### F. Inovasi

Inovasi yang dilakukan di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan telah menjadi *Best Practice* pada tahun 2023 adalah "**Manajemen Integrasi Kalender Akun [bpk.go.id](http://bpk.go.id)**", hingga triwulan I tahun 2024 inovasi tersebut masih dijalankan.

Hasil pelaksanaan inovasi adalah sebagai berikut:

1. Informasi jadwal dan agenda kerja selalu *update* dan *realtime*.
2. Koordinasi menjadi lebih cepat karena menggunakan fitur yang sama.  
Sebelum menggunakan agenda yang terintegrasi, informasi atas jadwal acara di kantor Perwakilan masih berada di unit kerja masing-masing, sehingga menyulitkan koordinasi. Setelah menggunakan integrasi kalender, jadwal kegiatan lebih terorganisir dan mempermudah koordinasi antar unit kerja dan tamu.
3. Dapat dipantau oleh semua pihak

Bagi internal pegawai, kegiatan dapat dipantau melalui gawai masing-masing; bagi tamu eksternal, dapat melihat agenda yang akan/ sedang berlangsung melalui layar TV yang terpasang di Lobby kantor perwakilan.

#### **G. Perhargaan**

Penghargaan-penghargaan yang diraih oleh Perwakilan Jawa Tengah selama tahun 2023 yaitu:

1. Peringkat 1 SDM Award, kategori Pemanfaatan Aplikasi Kepegawaian;
2. Peringkat 1 SDM Award, kategori Pengelolaan SKP;
3. Peringkat III SDM Award, kategori Pemutakhiran Data Mandiri;
4. Terbaik I, Pelayanan Informasi Publik BPK Perwakilan;
5. Peringkat II, Penghargaan UJDIH Penyusun Tulisan Hukum Terbaik;
6. Peringkat I, Penghargaan Foto Pemeriksaan *Stunting*;
7. Terbaik II, Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Tahun 2022 Lingkup Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah;
8. Penghargaan Adi Kirtya Arthasantosha, kategori Satker Perwakilan Terbaik tahun 2023

#### BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2024 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah merupakan perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja dalam rangka terselenggaranya *good governance* yang baik dan bentuk pertanggungjawaban untuk memberikan gambaran atas pencapaian target kinerja tingkat organisasi dan seluruh unit kerja yang telah mengintegrasikan penerapan manajemen risiko antara lain melalui identifikasi risiko yang menghambat pencapaian target kinerja dan upaya penanganannya. Pelaksanaan manajemen risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan rutin dan strategis untuk mendukung keberhasilan dan mengatasi hambatan dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi yang dioperasionalkan melalui pengukuran kinerja atas target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.

Berdasarkan hasil pengukuran atas seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam bentuk dokumen PK tahun 2024, pencapaian Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pada triwulan I tahun 2024 adalah sebesar **43,69**. Untuk menyempurnakan skor kinerja pada tahun 2024, diperlukan evaluasi dan perbaikan di antaranya meningkatkan kompetensi SDM pengelola kinerja, meningkatkan kualitas Laporan Hasil pemeriksaan serta perbaikan dalam perencanaan dan penganggaran.

Laporan Kinerja triwulan I tahun 2024 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah ini diharapkan dapat menyajikan informasi kinerja dalam membantu pengambilan keputusan maupun penetapan kebijakan oleh pimpinan BPK.

Semarang, 30 April 2024

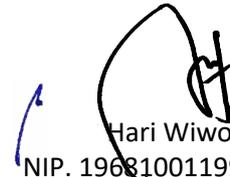
Manajer IKU



Bagus Kurniawan

NIP. 197710131999111001

Mengetahui,  
Kepala Perwakilan



Hari Wiwoho

NIP. 196810011996031003

# SKOR KINERJA BERDASARKAN APLIKASI PRISMA TRIWULAN I/ TAHUN 2024



Ardani Mutia Jati  LOGOUT

Input Data **Terkunci**

2024
MAR / TW 1
Daftar Satker

- Badan Pemeriksa Keuangan
  - Auditorat Utama Keuangan Negara I
  - Auditorat Utama Keuangan Negara II
  - Auditorat Utama Keuangan Negara III
  - Auditorat Utama Keuangan Negara IV
  - Auditorat Utama Keuangan Negara V
    - Sekretariat AKN V
    - Auditorat V.A
    - Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan
    - BPK Perwakilan Provinsi Aceh
    - BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
    - BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
    - BPK Perwakilan Provinsi Riau
    - BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
    - BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
    - BPK Perwakilan Provinsi Jambi
    - BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
    - BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu
    - BPK Perwakilan Provinsi Lampung
    - BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
    - BPK Perwakilan Provinsi Banten
    - BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat
    - BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta
    - BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
    - BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

### BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

PERIODE: MAR / TW 1 / 2024

Perjanjian Kinerja / Peta Strategi
Detail Scorecard
Indikator Kinerja Keluaran (IKK)

Expand
Refresh
Calculate
Export
Edit
Detail & Dokumen

| Nama  | Jenis             | Periode     | Target PK | Target  | Realisasi | Score                                       |
|---|-------------------|-------------|-----------|---------|-----------|---|
| ↳ BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah   | Scoreca...        | Triwulan... |           |         |           | 43.69 <span style="color: red;">●</span>    |
| ↳ Sasaran Kegiatan. Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi                        | Sasaran Strategis | Triwulan... |           |         |           | 43.69 <span style="color: red;">●</span>    |
| ↳ IKU 1. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan              | IKU               | Triwulan... | 100,00%   | %       | %         | 0 <span style="color: red;">●</span>        |
| ↳ IKU 2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan           | IKU               | Triwulan... | 100,00%   | %       | %         | 0 <span style="color: red;">●</span>        |
| ↳ IKU 3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan                         | IKU               | Triwulan... | 75,00%    | 75,00%  | 94,18 %   | 105 <span style="color: green;">●</span>    |
| ↳ IKU 4. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional | IKU               | Triwulan... | 100,00%   | %       | %         | 0 <span style="color: red;">●</span>        |
| ↳ IKU 5. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan                        | IKU               | Triwulan... | 100,00%   | 100,00% | 100,00 %  | 100 <span style="color: green;">●</span>    |
| ↳ IKU 6. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal    | IKU               | Triwulan... | 100,00%   | %       | %         | 0 <span style="color: red;">●</span>        |
| IKU 7. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK  | IKU               | Tahunan     | 4,81      |         |           | <span style="color: gray;">●</span>         |
| IKU 8. Hasil Evaluasi AKIP  | IKU               | Triwulan... | 90,05     |         |           | 0 <span style="color: red;">●</span>        |
| ↳ IKU 9. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi                                    | IKU               | Triwulan... | 98,00%    | 28,00%  | 56,79 %   | 105 <span style="color: green;">●</span>    |
| ↳ IKU 10. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan                                       | IKU               | Triwulan... | 100,00%   | 25,00%  | 25,00 %   | 100 <span style="color: green;">●</span>    |
| IKU 11. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi             | IKU               | Tahunan     | 3,80      |         |           | <span style="color: gray;">●</span>         |
| ↳ IKU 12. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi                                  | IKU               | Bulanan     | 100,00%   | 15,00%  | 76,34 %   | 105 <span style="color: green;">●</span>    |
| ↳ IKU 13. Tingkat Kinerja Anggaran  | IKU               | Triwulan... | 84,50%    | 84,50%  | 87,24 %   | 103.24 <span style="color: green;">●</span> |